

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN
JENEPONTO**

**REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN DEVELOPING TOURISM IN
JENEPONTO DISTRICT**



Oleh :

NORMA NOVIKA KADIR

E062212004

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA Di KABUPATEN
JENEPONTO**

**REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN DEVELOPING TOURISM IN
JENEPONTO DISTRICT**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Pada program Studi Ilmu Pemerintahan

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

NORMA NOVIKA KADIR

E062212004

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN JENEPONTO
REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN DEVELOPING TOURISM IN
JENEPONTO DISTRICT**

Disusun dan diajukan oleh
NORMA NOVIKA KADIR
E062212004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **7 Agustus 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

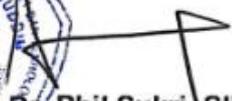

Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.
NIP 195707071984031005


Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.
NIP 196804112000121001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. A. M. Rusli, M.Si.
NIP 196407271991031001


Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008



PERNYATAAN KEORISINILAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norma Novika Kadir
NIM : E062212004
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN JENEPONTO** adalah karya tulisan saya sendiri dan merupakan pengambilan alih karya orang lain, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



NORMA NOVIKA KADIR

ABSTRAK

NORMA NOVIKA KADIR. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jeneponto* (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Suhardiman Syam).

Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto dan menggambarkan serta mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator model penelitian dan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPERKAP). Melalui peraturan yang ada strategi-strategi telah dirancang untuk meningkatkan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Langkah-langkah strategis yang dilakukan mencakup pengembangan daya tarik wisata dan atraksi, peningkatan fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata, serta perbaikan aksesibilitas dari dan ke destinasi pariwisata. Meskipun demikian, proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa faktor pendukung meliputi keberagaman potensi wisata yang dapat dikembangkan. Terdapat pula faktor penghambat seperti: infrastruktur jalan yang belum memadai, dukungan pemerintah yang belum optimal, dan keterlibatan masyarakat setempat yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut dan memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: pariwisata, implementasi kebijakan, pengembangan



ABSTRACT

NORMA NOVIKA KADIR. *Regional Government Policy in Tourism Development in Jeneponto Regency* (supervised by Rasyid Thaha and Suhardiman Syam)

Tourism is very important for the development and progress of a region. Tourism proceeds in Indonesia can become a source of tax revenue for the Indonesian State. The aim of this research is to describe the efforts made by the regional government in developing tourism in Jeneponto Regency. This research method used was descriptive qualitative research with a phenomenological type approach, aiming to describe and explore the efforts having been made by the regional government in tourism development in Jeneponto Regency. A qualitative method approach was used in this research. Interview guidelines were prepared based on research model indicators, as well as things needed. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the tourism development policy in Jeneponto Regency has been stated in Regional Regulation No. 3 of 2018 concerning RAPERKAP (Regency Tourism Development Master Plan). Through this regulation, strategies have been designed to improve the tourism sector in the region. These strategic steps include developing tourist attractions and attractions, improving facilities, services, and tourism management, as well as improving accessibility to and from tourism destinations. However, the tourism development process in Jeneponto Regency is not running without obstacles. Several supporting factors including the diversity of tourism potential can be developed. However, there are also inhibiting factors such as inadequate road infrastructure, government support that is not yet optimal, and local community involvement that still needs to be increased in tourism development efforts. Therefore, joint efforts from the government and community are needed to overcome these obstacles and maximize the desired tourism potential in Jeneponto Regency.

Keywords: tourism, policy implementation, development.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala curahan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Dapertemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang menjadi tauladan bagi para umat manusia, semoga selalu tercurah rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua. Aamiin.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat kerja keras dan kesungguhan serta doa, bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil, sehingga karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Alm. Bapak Drs. Kadir Sannari dan Ibu Fatmawati Guntur, S.Pd yang telah memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan anaknya. Dan juga kepada saudara ku Norma Nurfani Kadir dan Siti Nur Wahida Kadir yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama melaksanakan studi.

Perkenankan juga penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.,** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
4. **Dr. A.M. Ruslii, M.Si** selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin,
5. **Prof. Dr. Rasyid Thaha.M.Si** selaku Pembimbing I dan **Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si** selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan dan kontribusi ilmu terkait judul yang diangkat penulis serta selalu sabar dalam membimbing penulis.
6. **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Dr. A.M. Ruslii, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.I.P.,M.Si** selaku penguji yang memberikan banyak masukan dan perbaikan karya ilmiah tesis yang disusun oleh penulis.
7. Segenap Dosen Ilmu Pemerintahan dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis hingga ketaraf penyelesaian.
8. Elly Isriani Arief, S.H.,M.Si (Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto), Muh. Haerul P. (Staff Dinas

Tata Ruang Kabupaten Jeneponto), H Itho Albert (Staff Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto),Nurfadli Alqadri (Ketua Pagayuban Duta Pariwisata Turatea Kabupaten Jeneponto), Yuliani Kahar (Karang Taruna Desa Kassi Kabupaten Jeneponto) dan seluruh Masyarakat Kabupaten Jeneponto yang telah bersedia menjadi informan saya dan membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah tesis ini.

9. Kepada Teman seperjuangan di Ilmu Pemerintahan,yaitu Andi Tenriawaru Septiananinda Amran, Andi Nur Mughni Tanriani, Syahril Gunawan, Aidil Dwi Ramadhan, dan Ahmad Azhar Mawardi, yang telah memberi semangat dalam perjalanan studi penulis.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak meskipun belum cukup rasanya untuk membalas semua yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf apabila belum saya sebutkan satu persatu, semoga karya ilmiah tesis ini bermanfaat bagi penuntut ilmu serta. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Mei 2024

NORMA NOVIKA KADIR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Mafaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kebijakan Pemerintah.....	19
B. Evaluasi Kebijakan Publik.....	22
C. Pembangunan Berkelanjutan.....	25
D. Daya Tarik Wisata.....	29
E. Industri Pariwisata.....	36
F. Otonomi Daerah.....	40
G. Kerangka Konseptual.....	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di kabupaten Jeneponto.....	76
C. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jeneponto.....	80
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jeneponto.....	90
BAB V PENUTUP.....	118
A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas mencapai 5.193.250 km² dengan wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Tidak heran bahwa hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpotensi tinggi dalam hal perairan utamanya menyangkut dengan potensi wisatanya.

Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Dari hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak Negara Indonesia. Pariwisata suatu wilayah dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya.¹

Terkait dalam hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka

¹Arifin, M., Rijal, S., Salim, M. A. M., & Zaenal, A. F.(2020). Book-Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033. Politeknik Pariwisata Makassar.

memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.² Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan pariwisata di wilayahnya. Oleh karena itu, mereka perlu merumuskan strategi yang tepat dan efektif.

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang baik, maka pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Di dalam tatanam pemerintah daerah terdapat cakupan atau bidang-bidang tertentu dan dikelola oleh instansi dibawah pemerintah daerah Tingkat I atau II. Termasuk pelimpahan wewenang kepada Dinas kebudayaan dan pariwisata.³

Kegiatan kepariwisataan melibatkan banyak pihak: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat di daerah tujuan wisata, para

²Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030

³Hasrullah, Ida Bagus Suryawan. 2018. Penerapan community based tourism di kampung lakkang sebagai daya tarik wisata. Jurnal destinasi pariwisata. Vol.6 No 1

professional, para investor di sektor swasta. Demikian juga ada beraneka ragam unsur masyarakat, pelaku, dan investor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan. Ini berarti bahwa Bahasa kepemimpinan dalam kepariwisataan mencakup kepemimpinan baik di kalangan pemerintah, maupun sektor swasta.⁴

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 bahwa pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan secara terarah, terfokus, berkelanjutan, komprehensif, dan adaptif dengan berlandaskan atas nilai-nilai kepastian Hukum, kemanfaatan, sumberdaya wisata dan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pasal 4, sasaran RIPPARDA meliputi:

- Terselenggaranya pembangunan kepariwisataan Daerah yang terarah dan terpadu
- Ditetapkannya skala prioritas pembangunan kepariwisataan daerah

⁴Oka A Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 327.

- Tersedianya acuan bagi seluruh pemangku kepentingan Pariwisata; dan
- Tersusunnya program Indikatif pembangunan kepariwisataan Daerah.⁵

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategi, kemudahan akses, dan keramahan masyarakat yang religius.⁶ Daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto terdiri dari daya tarik wisata pantai, gua, laut, pulau, panorama, agro, sejarah, budaya masyarakat tradisional, maupun events (peristiwa pariwisata). Adapun potensi daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto dilihat dari aspek sejarah, aspek sosial budaya masyarakat, dan sektor-sektor lain yang terkait lainnya. Berdasarkan penghitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jeneponto tahun 2017 adalah sebesar 8,26 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 5.967.176,40 juta rupiah. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB kabupaten Jeneponto. Semakin besar

⁵Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030

⁶Arifin, M., Rijal, S., Salim, M. A. M., & Zaenal, A. F.(2020). Book-Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033. Politeknik Pariwisata Makassar.

persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah.⁷

Struktur Perekonomian Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor terbesar masih diberikan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,42 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih bertumpu pada sektor agraris. Pada Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya yang mencapai 51,69%. Sementara untuk sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu menyumbang dan memberikan kontribusi sebesar 0,29 % walaupun menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,01% per tahun. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih besar dalam struktur perekonomian kabupaten Jeneponto.⁸

Pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal,

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2018. Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, Jeneponto Regency In Figures 2018

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2018. Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, Jeneponto Regency In Figures 2018

ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur, ketersediaan dan konektivitas infrastruktur, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Untuk itu, destinasi dan industri pariwisata harus dikembangkan menjadi berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan citra dan terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata.⁹

Meningkatnya citra pariwisata dapat dikenali antara lain melalui jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik. Dalam penciptaan diversifikasi destinasi pariwisata maka jumlah lokasi daya tarik yang dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebagai penerapan prinsip *community based tourism*

⁹Riyani, E. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Berjo Kecamatan Ngaroyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(3), 218-225

untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat. Semakin banyak desa yang difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan serta pola perjalanan yang dikembangkan.¹⁰

Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri pariwisata yaitu Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu destinasi Pariwisata;

¹⁰Rijal, S., Nasri, N., Ardiansyah, T., & Chairil, A. (2020). Potensi pengembangan ekowisata rumbia Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 1-13.

Industri Pariwisata; Pemasaran pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisataan.¹¹

Konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan destinasi pariwisata meliputi perwilayahan pembangunan destinasi; pembangunan daya tarik wisata; pembangunan aksesibilitas pariwisata; pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan pengembangan investasi di bidang pariwisata. Pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui penguatan struktur industri pariwisata; peningkatan daya saing produk pariwisata; pengembangan kemitraan usaha pariwisata; penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.¹²

Ketersediaan akomodasi di Kabupaten Jeneponto saat ini masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hotel-hotel yang ada saat ini sebagian besar masih dikelola secara tradisional dan peruntukan bangunan hotel tersebut belum direncanakan untuk digunakan sebagai usaha komersil, sehingga hal ini berdampak pada pembangunan dan penataan bangunan tersebut sebagai hotel yang layak. Hal lain yang masih menjadi tantangan dalam mengembangkan Kabupaten Jeneponto sebagai destinasi menarik adalah tersedianya fasilitas pendukung selain

¹¹Suni, M. T., & Herianto, D. (2019). Efektivitas Peranan Pemerintah Daerah Dalam Merevitalisasi Potensi Objek Pariwisata Di Kabupaten Jeneponto. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1), 14-17.

¹²Soeda, E. S., Pioh, N., & Kasenda, V. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

fasilitas kamar, seperti fasilitas makan dan minum, ruang konferensi dan pertemuan, hiburan, akses internet dan fasilitas pendukung lainnya.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kedudukan masyarakat di sini bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan atau pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasilnya, akan menentukan arah keberlanjutan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Razak (2013) yang menyatakan pembangunan tidak hanya didominasi oleh pemerintah atau swasta saja, tapi masyarakat juga memiliki kekuatan dalam menentukan arah pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sangat penting agar objek wisata tersebut dapat berjalan dengan baik dan banyak diminati oleh pengunjung. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan wisata ini bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.¹³

Peraturan pemerintahan Republik Indonesia tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah bab IV pasal 15 ayat (1) tahun 2017 menegaskan bahwa “pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset atau sumber

¹³Pebrian, F., Mulyawan, R., & Sutrusno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mahalengka Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintah (janitra)*, 1 (1), 11-22

daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharannya.”¹⁴

Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan potensi obyek wisata yang ada di daerahnya. Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Jeneponto, pemerintah daerah dalam hal ini mengeluarkan misi ini guna meningkatkan berbagai obyek wisata di kabupaten jeneponto dan menunjang Pendapatan Asli Daerah. Dengan pengembangan obyek wisata tentunya dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah serta memberikan manfaat yang sangat besar terutama masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan melalui pengembangan obyek wisata ini.¹⁵

Kebijakan publik adalah sebuah aspek politik yang memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Secara garis besar, kebijakan adalah sebuah output dari setiap proses politik. Ia adalah cerminan pengaruh pemerintahan pada masyarakat. Kemampuan untuk menghasilkan suatu perbaikan-perbaikan atau menghasilkan keburukan. Secara umum kebijakan adalah sebuah upaya menyelesaikan masalah dengan dengan

¹⁴Suriyani, B. B., Manguntara, L., & Abdullah, M. Z. (2022). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Buton Tengah. *Journal Publicuho*, 5(3), 875-886.

¹⁵Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Makassar tahun 2015-2035

memakai berbagai macam solusi. permasalahan pokok yang sering terjadi dan dijumpai adalah siapa yang menjadi penentu masalah kebijakan menggunakan pendekatan apa dalam menetapkan masalah dan perlu diketahui kepentingan yang terdapat di balik penetapan sebuah masalah dan membuat kebijakan itu dan dengan siapa atau menggunakan jaringan mana sebuah kebijakan itu didorong untuk mewujudkannya.¹⁶ Kebijakan publik itu sendiri adalah mengambil jalan tengah dari setiap permasalahan yang muncul dari masyarakat dan harus segera ditangani dan diselesaikan untuk mencapai kesejahteraan Bersama dan tentu saja kebijakan harus terarah.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah jelas di butuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

¹⁶Hariado Kartodihadjo, *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Bogor, *Sajogyo Institute*, 2017), h.12.

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Kebijakan (*policy*) berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan publik juga merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.¹⁸ Bisa dikatakan kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam membuat sebuah keputusan yang akan diaplikasikan kepada seluruh masyarakatnya dan kemudian keputusan tersebut menjadi sebuah alat atau aturan yang mengikat masyarakat dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Maka sangat perlu sekali pengawasan dari masyarakat sendiri untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum.¹⁹

¹⁷Nining Yuningsih, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pengandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2005), h. 1.

¹⁸Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.19.

¹⁹Sanjiwani, P. K., & Pujani, L. P. K. (2020). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana Di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(2), 133-140.

Daerah berkewajiban memberikan bimbingan yang terarah untuk memobilisasikan serta mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Begitu pula dengan optimalisasi Pengelolaan Pariwisata yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan Daerah akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi dengan baik sehingga berdampak kepada pembangunan yang tidak meningkat.²⁰

Otonomi daerah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah memberikan kewenangan kepada setiap daerahnya untuk mengelola rumah tangga dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang sektor pariwisata ini dicangkangkan sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor pariwisata ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.²¹

²⁰Wa Ode Nela, Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Januari 2017, hal 7.

²¹Nining Yuningsih, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengembangan potensi obyek Wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat". *Skripsi*, (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang,2005), h. 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah daerah memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata, antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pariwisata daerah
- Membuat dan melaksanakan strategi pengembangan pariwisata daerah
- Mengembangkan destinasi wisata
- Meningkatkan promosi wisata
- Membangun dan meningkatkan infrastruktur wisata
- Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata
Memelihara dan melestarikan budaya dan tradisi lokal
- Membuat regulasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata
- Melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan peran serta tanggung jawabnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengembangan pariwisata yang komprehensif dan terukur. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi dan misi daerah, serta mempertimbangkan potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki.

Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang paling tertinggal diantara kabupaten lain di Sulawesi Selatan dalam hal peningkatan perekonomian dengan mengembangkan tempat wisata yang akan

meningkatkan pendapatan daerah. Dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Jenepono, apabila Pemerintah Daerah dapat mengelolanya dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jenepono. Otomatis sektor pariwisata harus terus memperbaiki strategi agar pelayanan yang dicakup oleh sektor ini dapat merealisasikan penerimaan pajak daerah yang telah direncanakan dan dengan majunya sektor pariwisata diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini pariwisata di Kabupaten Jenepono belum berjalan secara maksimal, yang kita ketahui bahwa Kabupaten Jenepono memiliki 52 objek destinasi wisata baik itu wisata alam, buatan, bahari, maupun wisata budaya yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik maka nantinya mampu menarik perhatian wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi, meskipun Kabupaten Jenepono memiliki sejumlah objek wisata, Kabupaten Jenepono belum bias diandalkan karena dari 52 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jenepono, Dinas Pariwisata hanya menetapkan 3 objek wisata unggulan diantaranya yaitu Pantai Tamarunan, Agrowisata Desa Kassi, dan Desa Kassi Rumbia.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Jenepono. Meskipun saat ini sudah banyak kabupaten/kota yang menerapkan peraturan daerah,

namun dalam implementasinya pemerintah masih kurang dalam pengawasan pengelolaan sektor pariwisata. Oleh karena itu, peran Pemerintah saat ini sangat perlu ditingkatkan guna mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian dalam penelitian ini yakni “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Jeneponto”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendalami, menganalisis, serta mendeskripsikan Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu untuk memberi kesadaran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai administrator kebijakan publik berdasarkan aturan hukum yang

berlaku dan juga sebagai pendidikan hukum kepada masyarakat tentang pengembangan potensi pendapatan asli daerah terhadap pariwisata.

Adapun kegunaan lain dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Metodologis

Diharapkan penelitian ini dengan sumber yang valid maka hasil penelitian memberikan penelitian yang berkualitas sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan analitis yang penting dalam Kebijakan Pemerintah Daerah pada Pengembangan Pariwisata.

3. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Daerah.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah Daerah pada Pengembangan Pariwisata.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang Pengembangan Pariwisata.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebijakan Pemerintahan

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana oleh berbagai pejabat di daerah.²²

Thomas R. Dye (1989:1) dalam bukunya *Introducing public policy* (kebijakan negara), yaitu apapun juga yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu, atau tidak melakukan sama sekali. Jadi, kalau melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan apa-apa sama sekali adalah juga keputusan, karena pemerintah sebagai pihak penyelenggaraan yang memiliki kekuasaan (karena membawahi polisi, militer, jaksa, dan berbagai pemegang pengamanan dan ketertiban) dapat saja mencecegah segala sesuatu seperti kebakaran, pencurian, perjudian, dan berbagai kriminalitas, dan apabila hanya diam akan dianggap sengaja melindunginya untuk maksud materialistik.²³

b. Model Kebijakan Pemerintahan

Membuat kebijakan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah (*public*

²²Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 145.

²³Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 355.

policy) itu merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijakan (*policy making*), yaitu memiliki dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

Dr. Miftah Thoha mengutip Harold Laswell bahwa ada beberapa tugas intelektual dalam persoalan tersebut di atas, yaitu penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.²⁴

Selain daripada itu, ada beberapa model pengambilan kebijakan pemerintahan yang dikemukakan oleh Harold Laswel, yaitu sebagai berikut:

1. Model Elit, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada orang elit tertentu yang dekat dengan penguasa. Oleh karena itu, lahirlah berbagai grup penekan atau ataupun kelompok kepentingan.
2. Model Kelompok, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada orang-orang sedang memegang posisi dominan. Oleh karena itu, dimanfaatkan oleh lingkaran penguasa formal setempat.
3. Model Kelembagaan, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada Lembaga seperti

²⁴Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 146.

eksekutif, legislative, dan yudikatif. Apabila bekerja sama akan tirani, tetapi bila terjadi *check and balances* akan demokrasi.

4. Model proses, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada bagaimana rangkaian kegiatan dimulai yang dirancang dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Model Rasialisme, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan pada logika bagaimana lebih efisien dan efektif. Jadi, didasari *cost and benefit* jadi memperhitungkan kerugian dan keuntungan secara ekonomis.
6. Model Inkriminalisme, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan masa lalu yang dimodifikasi tidak terlalu jauh dalam arti dilakukan tambal sulam seadanya.
7. Model Sistem, yaitu model pembuatan kebijakan yang hanya berkisar pengambilan keputusan dengan memerhatikan desakan lingkungan mulai dari tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan, dengan perhitungan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan kendala. Secara sistematis dicari berbagai masukan dan kemudian jelas apa yang menjadi hasil dalam keluaran nanti.²⁵

²⁵Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 355

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Widodo yang mengutip pendapat Jones, menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan public merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Secara umum, istilah evaluasi disamakan dengan panaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Hanafi dan Guntur, evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁶

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Berpijak dari pengertian evaluasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atau suatu “fenomena” yang didalamnya terkadang pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan , seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrument kebijakan yang dipergunakan, respon dari

²⁶Hayat, *Kebijakan Publik*, (Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2018), h. 35

lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.²⁷

a. Sifat Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langka-langka strategis ke depan menjadi lebih baik. Disamping itu, evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi untuk menjamin organisasinya berjalan dengan baik. Evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama* : fokus nilai, *Kedua* : interdependensi fakta nilai, *Ketiga* : orientasi masa kini dan masa lampau, *Keempat* : diatas nilai.

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut Nugroho, Kebijakan Publik bertujuan untuk mengatur kehidupan Bersama, dalam arti untuk mencapai tujuan (visi dan misi) Bersama yang telah disepaksti. Sehingga jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan Bersama yang dicita-citakan.²⁸

Samodra Wibawa mengungkapkan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

²⁷Hayat, *Kebijakan Publik*, (Malang, Jatim : Instans Publishing, 2018), h. 92.

²⁸Ibid. 37

- a) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya;
- b) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah Tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun perilaku lainnya sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
- c) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
- d) Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui akibat social-ekonomi dari kebijakan tersebut,

c. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan review atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya: yang sudah baik ditingkatkan sedangkan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorongan.²⁹

²⁹Hayat, *Kebijakan Publik*, (Malang, Jatim : Intrans Publishing, 2018), h. 38.

Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Jenepono terhadap Kebijakan Publik tentang Perda Pengembangan Kepariwisata yang telah lama disahkan. Sehingga dengan teori ini maka sebab mengapa kurangnya perhatian terhadap pariwisata bisa di pahami.

C. Pembangunan berkelanjutan

a. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep ini menuntut keselarasan antara lingkungan, sosial dan ekonomi dari daerah tersebut. Secara umum, ada beberapa ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan yang dilaksanakan mampu meminimalkan pencemaran lingkungan, memperhatikan lingkungan fisik dan sosialnya, dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar pada kemanusiaan serta memperhatikan moral yang dianut masyarakat, bersifat fundamental dan ideal serta berjangka Panjang dan pendek, juga berpedoman untuk selalu

mempertahankan stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan nasional (ruhenda et al., 2016)³⁰

b. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah didefinisikan sebagai pengembangan pariwisata yang dapat memenuhi permintaan wisatawan dan masyarakat sebagai tuan rumah sambil melestarikan dan meningkatkan peluang untuk pengembangan dimasa depan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Haryanto, 2014). Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat memiliki makna beragam. Orang dari banyak yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan yang berbeda pula. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sisoal terhadap masyarakat.³¹

Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber-sumber daya alam dan budaya. Sumberdaya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang supaya dapat hidup dengan kesejahteraan, tetapi harus di pelihara dan dilestarikan agar dapat juga digunakan dimasa yang akan datang. Pemanfaatan sumberdaya tersebut

³⁰Ananta Prathama., Risca Evia Nuraini., & Yulita Firdausi (2020). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(3). 31

³¹Ibid. 33

harus pula melibatkan masyarakat lokal dan memberikan manfaat optimal bagi mereka sehingga pariwisata berkelanjutan harus dibentuk berdasarkan tiga dimensi agar menjadi berkelanjutan jangka panjang. Dimana pariwisata berkelanjutan itu sendiri hendaknya sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya lingkungan: elemen ini menjadi kunci pembangunan kepariwisataan secara optimal dengan menjaga ekologi dan melakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati.
2. Menghormati keotentikan sosiol-budaya dan komunitas tuan rumah: dimana hal ini melakukan pelestarian pusaka buatan dan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional, serta kontribusi masyarakat dalam pemahaman antar budaya dan toleransi.
3. Memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang: semua pemangku kepentingan berlaku adil, terdapat lapangan kerja yang stabil, dan adanya peluang untuk komunitas tuan rumah sehingga memperoleh pendapatan dan pelayanan sosial serta mengurangi kemiskinan.³²

Ide-ide itu kemudian diturunkan kedalam konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya adalah pembangunan sumberdaya (atraksi, aksesibilitas, dan amenities) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan

³²Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), h.25-26

keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka Panjang. Oleh sebab itu kalau ingin di kembangkan adalah infrastruktur pariwisata, maka ia harus memberikan keuntungan jangka Panjang bagi semua pelaku wisata. Disini kualitas jasa dan layanan yang dihasilkan dalam pengembangan tersebut harus terjamin supaya wisatawan yang menggunakannya dapat memperoleh kepuasan yang optimal. Kepuasan wisata tentu saja akan ditukarkan ke dalam bentuk keuntungan para pemangku kepentingan. Jadi pariwisata hanya dapat bertahan lama atau berkelanjutan jika ia memberikan kepuasan bagi wisatawan dalam jangka Panjang dalam bentuk pengalaman yang lengkap (*total experience*). Kepuasan inilah yang merupakan komoditas dan ditukarkan dalam bentuk keuntungan bagi pemangku kepentingan.³³ Bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan muncul dan berkembang? Para ahli telah memaparkan latar belakang akan hal ini secara jelas dengan mengambil kasus-kasus dari berbagai negara tujuan wisata. Intinya adalah bahwa pariwisata konvensional cenderung mengancam kelestarian sumber daya pariwisata itu sendiri. Tidak sedikit resort-resort eksklusif dibangun dengan mengabaikan daya dukung (*carrying capacity*) fisik dan sosial setempat. Jika hal itu terus berlanjut maka kelestarian ODTW akan terancam dan pariwisata dengan sendirinya tidak akan dapat berkembang lebih lanjut. Padahal permintaan pasar juga sudah bergeser ke produk wisata yang

³³Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), h. 26

mengedepankan faktor lingkungan dan sosial budaya sebagai daya tarik utama, sekaligus sebagai keunggulan komparatif suatu produk.

D. Daya Tarik Wisata

a. Pengertian Pariwisata

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. runtuhnya system kelas dan kasta, semakin meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ditemukannya teknologi transportasi, dan peningkatan waktu luang yang didorong oleh penciutan jam kerja telah mempercepat mobilitas manusia antara daerah, negara, dan benua, khususnya dalam hal pariwisata. Krippendorf (1984: 41) menggambarkan bahwa perkembangan tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya tatanan hidup masyarakat (*zunehmenda Reglementierung des gesellschaftlichen Lebens*).³⁴

Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembangan dan individu,

³⁴Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), h. 1

kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya. Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan ruhani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial.³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usahayang terkait dibidang ini. Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

b. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata Menurut Yeoti, pengembangan adalah usaha atau cara untukmemajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata

³⁵Welsha Fivylandra, "Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Agam Dalam Pengelolaan Objek Wisata Muko-Muko", *Skripsi* (PekanBaru: Jurusan Administrasi Negara, Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 27.

selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.³⁶

Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu negara atau daerah karena multieffek yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, stimulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun jasa sehingga pariwisata terus berkembang. Dikemukakan oleh Marpuang pengembangan pariwisata tidak terlepas dari adanya daya tarik sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjukkan oleh adanya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Objek daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion.³⁷

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenities, dan akses) yang menawarkan pengalaman utuh/terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara tradisional destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan Batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau, atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997). Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangannya, Kelly &

³⁶Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah.,139

³⁷Dini Yulianti."DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat 2020), Skripsi (Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO), h. 24

Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu:

1. **Atraksi** (*attractions*) yang mencakup alam, budaya, buatan (*artificial*), *event* dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan system transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan mode transportasi.
3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, bank, pemadam kebakaran, keamanan, rumah sakit, dan sebagainya. dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cendra mata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma dan sebagainya.
5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat diikuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.³⁸

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih

³⁸Arifin, M., Rijal, S., Salim, M. A. M., & Zaenal, A. F.(2020). Book-Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033. Politeknik Pariwisata Makassar.

dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesibilitas dan unsur penunjang lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan system yang saling menunjang.

Komponen pengembangan pariwisata diatas dapat dipahami bahwa atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan. Dalam melakukan perjalanan wisatawan memerlukan sarana yang memberikan kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai ke suatu objek wisata serta fasilitas dasar seperti jalan raya, akomodasi, pusat informasi, pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan merasa nyaman. Kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran merupakan kegiatan untuk membangun citra wisata.

c. Daya Tarik Wisata

Menurut Zaenuri (2012) daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki daya tarik untuk dilihat dan dinikmati yang layak dijual kepasar wisata. Menurut Dephut, 2003; wiratini et al (2018) dalam Marpaung (2019) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang beranekaragam kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan. Menurut Pendit (1994) dalam Sondakh (2016) menyebutkan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Menurut Yoeti (2006) dalam Utari (2016) daya tarik wisata

adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Menurut Ismayanti (2009) dalam Apriliyanti (2020) daya tarik wisata adalah fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Menurut Lopian Dkk (2015) dalam Apriliyanti (2020) memaparkan bahwa daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Menurut Basiya dan Rozak (2012) dalam Parastiwi (2017) daya tarik tempat tujuan wisata merupakan motivasi utama bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa Daya Tarik adalah sesuatu yang memiliki daya tarik untuk dinikmati dan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, serta nilai yang beranekaragam kekayaan alam serta sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Aprilia (2017), Marpaung (2019), Sondakh (2016), Utari (2016).

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Tarik Wisata

Oleh sebab itu perlu dijelaskan bahwa elemen penawaran wisata sering disebut sebagai *triple A's* yang terdiri dari:

1. Attraction

Atraksi dapat diartikan sebagai objek wisata (baik yang bersifat *tangible* maupun *intangibile*) yang memberikan kenikmatan kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi tiga, yakni alam, budaya, dan buatan.

2. Accesbility

Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan *dari, ke dan selama* di daerah tujuan wisata (Inskeep, 1994) mulai dari darat, laut, sampai udara.

3. Amenity

Amenitas adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan. Bank, penukaran uang, telekomunikasi, usaha persewaan (*rental*), penerbit dan penjual buku panduan wisata, seni pertunjukan (teater, bioskop, pub dan lain-lain) dapat digolongkan ke dalam bagian ini.³⁹

b. Indikator Daya Tarik Wisata

Menurut Taskia dan Hayati (2012) dalam Apriliyanti (2020) Indikator-indikator daya tarik wisata dalam industri pariwisata yang sangat penting, yaitu:

1. Keunikan cinderamata

Cinderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang wisatawan kerumahnya untuk kenangan yang terkait dengan benda itu. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini kadang disinonimkan dengan oleh-oleh, souvenir, tanda mata atau kenang-kenangan.

³⁹Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), h.25-26

2. Keindahan alam

Keindahan bangunan adalah sebuah seni, hasil dari daya rasa dan pikir yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk sebuah karya. Memiliki daya tarik yang penting dalam memikat mata setiap yang memandang. Semakin tinggi nilai seni yang dalam bangunan, mestinya daya tariknya semakin besar.

3. Keramahtamahan

Keramahtamahan adalah sikap dimana manusia berinteraksi dengan sesamanya dengan kelembutan tutur kata dan bahasa.

4. Kesejukan udara

Kesejukan angin atau populer dengan sebutan faktor kesejukan angin adalah suhu udara yang dirasakan lebih dingin daripada suhu yang terukur oleh termometer ketika angin berhembus menerpa kulit yang terbuka.⁴⁰

E. Industri Pariwisata

a. Industri Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu industri masih diperdebatkan di antara para pakar. Hal itu cukup beralasan seperti juga dikatakan oleh Robert Christie

⁴⁰Arvan Fajar Prianggie, "PENGARUH DAYA TARIK WISATA SISTEM KESEHATAN DAN SARANA WISATA TERHADAP LOYALITAS WISATAWAN MELALUI KEPUASAN SEBAGAI VARIABLE (Studi Pada Pengunjung Agrowisata Kaligua Paguyangan, Brebes), Skripsi (Purwakerto: Program Studi Manajemen, Fak: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah), h. 14-15

Mill dan Alastair M. Morrison (1984: xvii) Kembali dalam buku mereka berjudul *The Tourism System: An Introduction Text* mengatakan:

“Tourism is a difficult phenomena to describe. We have trouble in thinking of tourism as an industry. The idea of ‘tourism insudtry’ would give some unity to the idea of tourism, and from an image and a political viewpoint it sounds attractive”

pelaku berikutnya adalah penyediaan jasa atau sering disebut industri pariwisata. industri pariwisata artinya semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata (Freyer, 1993: 121). Mereka dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan utama berikut ini:

- a) Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dll). Secara faktural hotel menjadi pihak paling utama yang bersentuhan langsung dengan wisatawan, kemudian diikuti oleh biro perjalanan.
- b) Pelakutidak langsung, yakni usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung

pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbitan buku atau lembar panduan wisata, penjual roti, dll.⁴¹

Sesungguhnya pelaku terdepan dalam kedua kelompok ini adalah tenaga kerja, karena mereka yang akan menjadi penanggungjawab kualitas layanan di hotel, di biro perjalanan, di restoran, maupun usaha kerajinan. Oleh sebab itu, optimalisasi fungsi dan kompetensi mereka merupakan suatu keharusan dan menjadi titik perhatian dalam perencanaan pariwisata.

Batasan pariwisata sebagai suatu industry diberikan secara terbatas, hanya sekedar untuk menggambarkan apa sebenarnya pariwisata itu. Dengan demikian dapat memberikan pengertian yang lebih luas. Jadi sebenarnya, ide memberikan istilah industri pariwisata (*tourism industry*) lebih banyak bertujuan memberikan daya tarik supaya pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonomian suatu negara, terutama pada negar-negara sedang berkembang. Gambaran pariwisata sebagai suatu industry diberikan hanya untuk menggambarkan pariwisata secara konkret, dengan demikian dapat memberikan pengertian yang lebih jelas. Jadi ide sebenarnya memberikan istilah "industri pariwisata" lebih banyak bertujuan untuk meyakinkan orang-orang bahwa pariwisata memberikan dampak positif dalam perekonomian, terutama dampak dari *multiplier effect* yang ditimbulkan.

⁴¹Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), h.20-21

Sebagai suatu industri, pariwisata tidak bisa diukur, karena tidak memiliki standar nomor klasifikasi seperti dikatakan oleh Robert Christie Mill dan Alastair M. Morrison “*There is no Standard industrial classification number for tourism*”. sebenarnya, dari sudut pandang politis, ide memberikan istilah *tourism industry* memberi peluang untuk memperlihatkan kepada orang banyak bahwa pariwisata memberikan dampak positif, karena menjadi katalisator dalam pembangunan. hal ini menjadi tanggung jawab kita semua.⁴²

b. Produk Industri Pariwisata

Seperti kita ketahui, suatu paket wisata minimal terdiri dari dua unsur yang penting dan mutlak harus tersedia, yaitu: *transportasi, akomodasi*, sedangkan yang lain dapat diurus sendiri oleh calon wisatawan. tetapi kebanyakan paket wisata hamper selalu dijual dalam bentuk *all inclusive*, dimana di dalamnya termasuk unsur:

- transportasi atau angkutan pariwisata lainnya.
- akomodasi hotel atau sejenisnya
- restoran dan rumah makan lainnya
- *local tour* di DTW yang dikunjungi
- objek dan atraksi wisata di DTW yang dikunjungi.

jadi sebenarnya produk final industry pariwisata itu tidak lain adalah kumpulan dari bermacam-macam produk yang dihasilkan oleh

⁴²Oka A Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 10-11

perusahaan-perusahaan yang memberi pelayanan secara langsung kepada wisatawan bila melakukan perjalanan wisata. disinilah peranan seorang tour planer dalam Menyusun suatu paket wisata. ia memilih dan memilah-milah produk perusahaan kelompok industry pariwisata untuk dimasukan sebagai unsur yang dapat melengkapi suatu paket wisata yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan sehingga akhirnya kita mengenal *all-inclusive-tour* yang berarti wisatawan tinggal ikut saja, semua diurus oleh *tour operator* penyelenggara.

F. Otonomi Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Secara Umum, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatu`r dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara Etimologi istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *auto* dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.⁴³

Menurut Ateng Syafruddin (1985:23), mengemukakan bahwa otonomi bermakna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan sebagai hakekat dari otonomi dimaksudkan untuk memerintah dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah

⁴³Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *PAJAK DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2018), h. 1

atas Prakarsa sendiri. Sedangkan Ndraha (2003:716) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kesanggupan. Otonomi daerah sebagai hak, merupakan respon terhadap system pemerintahan kolonial dan kemudian sebagai ungkapan hubungan antara pusat dengan Daerah. Otonomi sebagai kewenangan, merupakan jiwa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 guna memperkuat posisi pusat terhadap daerah. sedangkan otonomi daerah sebagai kesanggupan, dilakukan melalui pemberdayaan (*enabling*) dan demokratisasi (*empowering*).⁴⁴

Otonomi memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata di daerah. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana dan cepat. Di samping itu peluang untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata menjadi lebih terbuka. Daripada menunggu proses pengambilan keputusan yang sering memakan waktu yang sangat lama di tingkat pusat, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan sendiri untuk memilih dan melaksanakan proyek-proyek kepariwisataan. Semua ini sebenarnya merupakan modal besar untuk mempercepat proses pengembangan pariwisata di berbagai daerah.⁴⁵

⁴⁴Muhammad Ramli. *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEMANUSIAAN*, (Makassar, Alauddin University Press), h. 298

⁴⁵Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *PERENCANAAN EKOWISATA*,(Yogyakarta, C.V ANDI, 2006), h. 35

b. Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah.

- prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencaup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik, luar negeri, keamanan, mineter, agamar, peradilan, dan keamanan, serta fiscal nasional.
- prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut

- Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
- Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.⁴⁶

⁴⁶Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *PAJAK DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2018), h. 3-9

A. KERANGKA KONSEPTUAL

